

Analisis Kebijakan Pemberdayaan Kelompok Perempuan Miskin di Nusa Tenggara Timur

Khaerul Umam Noer¹ Sipin Putra² Endang Rudiati³

Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten^{1,3}

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta²

Email: umam.noer@umj.ac.id¹ sipin.putra@gmail.com² endang.rudiati@umj.ac.id³

Abstrak

Kemiskinan merupakan persoalan klasik di hampir semua wilayah di Indonesia, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani persoalan tersebut. Tulisan ini berfokus pada kebijakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di wilayah Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Program ini adalah program yang menggunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan secara terkoordinasi, dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelompok perempuan miskin, serta untuk mengetahui dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mempergunakan metode etnografi dalam pengumpulan dan analisis data. Dengan menggunakan model agile governance, terutama pendekatan dynamic governance, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang direncanakan dapat diubah, direvisi, dan ditambahkan di dalam prosesnya. Berbeda dengan model kebijakan tipe air terjun, di mana kebijakan bersifat rigid dan kaku, berjalan satu tahapan berlanjut ke tahap berikutnya, model agile membuka peluang bagi pengambil kebijakan untuk melakukan refleksi dan revisi kebijakan di tengah prosesnya. Hal ini misalnya terlihat dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan yang diberikan kepada kelompok perempuan miskin, di mana mereka diberikan pelatihan-pelatihan sebagaimana yang sudah ditetapkan, akan tetapi kebijakan tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah dengan melihat kebutuhan dan potensi yang dimiliki kelompok perempuan miskin.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Agile Governance Model, Kelompok Perempuan Miskin



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki sumber daya yang cukup, baik itu dalam bentuk uang, pendidikan, pekerjaan, atau akses terhadap layanan kesehatan dan fasilitas dasar lainnya, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemiskinan dapat diukur dengan berbagai cara, termasuk pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Ada dua jenis kemiskinan utama. Kemiskinan relatif, yang mencerminkan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Seseorang dianggap miskin relatif jika pendapatan atau kondisinya secara signifikan lebih rendah daripada rata-rata masyarakat di sekitarnya; dan kemiskinan absolut, yang mengacu pada kekurangan sumber daya yang esensial untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, pakaian, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan standar minimum yang diperlukan untuk hidup yang layak (Noer et al., 2021; Noer & Madewanti, 2020).

Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur ekonomi, tingkat pendidikan, akses ke pekerjaan, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor sosial lainnya. Pemberantasan kemiskinan melibatkan berbagai upaya, termasuk program-program sosial, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kebijakan ekonomi yang mendukung inklusivitas dan

pemerataan pembangunan. Kehidupan ekonomi masyarakat miskin dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk lokasi geografis, tingkat pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah, dan faktor-faktor sosial lainnya. Ada beberapa ciri umum yang sering kali terkait dengan kehidupan ekonomi masyarakat miskin, misalnya pendapatan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Salah satu ciri utama dari kehidupan ekonomi masyarakat miskin adalah pendapatan yang rendah. Mereka mungkin memiliki akses terbatas atau tidak memiliki akses sama sekali ke pekerjaan yang membayar dengan baik. Pendapatan yang rendah dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Masyarakat miskin seringkali memiliki akses terbatas atau tidak memiliki akses sama sekali ke layanan keuangan formal. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk menyimpan uang, mengakses kredit, atau menggunakan instrumen keuangan lainnya.

Masyarakat miskin seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Faktor-faktor seperti biaya sekolah, jarak tempuh, dan kurangnya sumber daya pendidikan dapat menjadi hambatan. Kurangnya pendidikan dapat membatasi peluang pekerjaan dan menghambat mobilitas sosial (Astuti, 2012; Noer, 2021). Banyak orang miskin bekerja dalam pekerjaan yang tidak stabil atau tidak memiliki jaminan sosial. Pekerjaan dengan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak aman dapat menjadi kenyataan sehari-hari bagi masyarakat miskin. Masyarakat miskin mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang baik. Faktor-faktor seperti biaya pengobatan, lokasi fasilitas kesehatan, dan kurangnya pemahaman tentang kesehatan preventif dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat miskin (Hardiyanti et al., 2020; Lestari et al., 2019; Putri & Noer, 2019).

Tulisan ini berfokus pada program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di wilayah Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Secara umum, tulisan ini berfokus pada dua hal. Pertama, bagaimana pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di lapangan, dan kedua, bagaimana model agile governance model, melalui model dynamic governance dapat mendorong keterjangkauan dan dinamika program pemberdayaan itu sendiri. Program-program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan sosial dapat membantu mengatasi beberapa tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan meningkatkan peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode etnografi dalam pengumpulan dan analisis data. Tim peneliti melakukan penelitian lapangan di Manggarai Timur, dengan melakukan wawancara pada kepala dinas terkait, ketua PKK, kader, dan anggota gereja yang menjadi penerima manfaat program.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DDP2KBP3A) merupakan Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintah dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Manggarai Timur. Salah satu Bidang di DDP2KBP3A yakni Bidang Perlindungan Perempuan Pengarusutamaan Gender atau disingkat PPPG memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender. Untuk itu berdasarkan tugas dan fungsinya DP2KBP3A memiliki empat bidang dan masing-masing bidang memiliki dua seksi dibawahnya yang memiliki tanggung jawab terhadap masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DP2KBP3A.

Salah satu tupoksi Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender/PPPG ini adalah menjadi tim pelaksana program UP2K. Di dalam PPPG sendiri memiliki dua seksi, yang pertama seksi Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama, dan yang kedua adalah Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan terpadu melalui program UP2K berada dibawah Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Program UP2K adalah salah satu program yang merupakan upaya untuk meningkatkan peranan wanita dalam masyarakat menuju keluarga sejahtera. Program UP2K merupakan program terpadu dimana mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan secara terkoordinasi dengan upaya yang di arahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas, untuk peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat yang dimulai dari perempuan. Dalam mengembangkannya, perempuan harus dilibatkan dalam setiap program pembangunan yang ada sehingga pemanfaatan berbagai sumber daya dapat dimaksimalkan (BPP Manggarai Timur, 2019; Prasetyawan, 2020).

Program penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui strategi dan arah kebijakan peningkatan ketahanan pangan, pelayanan kesejahteraan sosial, serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui pelaksanaan program UP2K, karena salah satu tujuan program tersebut adalah mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera termasuk perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan kedudukan, peran, kemampuan, kemandirian serta ketahanan mental dan sporotual perempuan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan dalam rangka pembangunan masyarakat di wilayah tertinggal. Program Terpadu UP2K merupakan salah satu program peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan yang berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam rangka pembangunan masyarakat desa dengan perempuan sebagai penggerakannya. Persepsi tentang peningkatan kedudukan dan peranan wanita dalam pembangunan bangsa, didasarkan pada pandangan bahwa wanita adalah warga negara dan sumber daya insani pembangunan yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, peranan dan kesempatan yang sama dalam pembangunan disegala bidang termasuk kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sasaran utama dari program UP2K adalah keluarga miskin/miskin di Desa/Desa dengan perempuan sebagai penggerak utama (Handayani et al., 2019; Nurfadillah, 2019; Purnama & Suhendar, 2022). Kemiskinan bersifat sangat kompleks, terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakatnya. Perempuan yang menjadi peserta UP2K adalah perempuan berusia 15 – 64 tahun dengan tingkat kesejahteraan tergolong rendah dan atau yang masuk dalam kategori keluarga miskin, keluarga miskin dengan tingkat kesejahteraan yang masih tergolong rendah dan menurut hasil pendataan Badan Pusat Statistik, di mana jangkauan dari program ini adalah berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Akan tetapi dalam pembahasannya akan difokuskan pada kegiatan ekonomi/daya beli dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan bagi kelompok perempuan prasejahtera dalam kegiatan program Terpadu UP2K. Berdasarkan latar belakang, pengertian, ruang lingkup, landasan hukum dan tujuan Program Terpadu UP2K, maka strategi dan kebijakan Program Terpadu UP2K adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di segala bidang (multi sector);
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan/hak masyarakat dalam pelayanan dasar;

3. Meningkatkan dan mengembangkan keberdayaan perempuan dan anak melalui kemandirian berusaha, ketahanan keluarga dan pengembangan kreativitas anak usia dini;
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, serta pelayanan yang berbasis pada pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga;
5. Mengoptimalkan pelayanan kependudukan;
6. Meningkatkan akses usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta peran koperasi untuk produksi dan produktivitas pertanian unggulan/potensial;
7. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja untuk mengoptimalkan kapasitas industri rumahan dan mengembangkan potensi lokal;
8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana/infrastruktur lingkungan permukiman serta ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat; dan
9. Meningkatkan penanganan persampahan dan kesehatan lingkungan.

Tahapan awal program dilakukan dengan penyiapan tugas dan lapangan. Penyiapan tugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim agen perubah mengenai pendekatan apa yang dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Dalam persiapannya, sebelum dilaksanakannya program UP2K terlebih dahulu Organisasi Perangkat Daerah atau Dinas-dinas terkait program UP2K melaksanakan rapat koordinasi tingkat Kabupaten Manggarai Timur bersama BAPPEDA. Dalam penentuan lokasi fokus/lokus menjadi salah satu komponen yang utama dalam pelaksanaan program UP2K. Pada awal penentuan lokus ini menjadi perencanaan yang harus dilakukan dengan matang, dan cukup mengalami kesulitan dikarenakan banyaknya lokasi memang membutuhkan adanya program UP2K.

Dengan demikian perencanaan lokus UP2K dilakukan satu tahun sebelum pelaksanaan program UP2K. Rakor juga dilaksanakan untuk membuat penganggaran program UP2K. Dilakukan pula pengkajian bagaimana IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kecamatan Poco Ranaka yang tergolong rendah. Lalu melihat data BDT (Basis Data Terpadu) untuk mengetahui berapa banyak warga miskin yang berada di wilayah sasaran. Sehubungan dengan perencanaan kegiatan UP2K yang dibuat, maka Dinas-dinas terkaitpun turut dilibatkan. Dinas-dinas terkait turut mengambil peran sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan nantinya. Sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut dinas-dinas terkait mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh BAPPEDA dan DP2KBP3A untuk selanjutnya membuat jadwal masing-masing kegiatan yang akan diberikan.

Setelah tahap persiapan dilakukan, maka tahap berikutnya adalah asesmen lapangan. Pada tahap assesment yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah, yaitu kebutuhan yang dirasakan (*self needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki. Dalam proses ini dinas-dinas terkait melakukan survei terlebih dahulu. Melalui OPD di tingkat desa, dinas melakukan koordinasi untuk penetapan akan dilaksanakannya program UP2K. Langkah berikutnya dari desa akan terjun ke masyarakat melalui RT dan RW untuk selanjutnya mengkaji dan melihat potensi SDM yang ada di masing-masing desa. Pihak desa akan membuat list kegiatan yang akan dilaksanakan untuk selanjutnya akan di komukasikan kepada ibu-kelompok perempuan miskin sebagai sasaran dalam pelaksanaan program UP2K.

Dilakukannya sosialisasi awal di awal kepada ibu-kelompok perempuan miskin bahwa kegiatan UP2K seperti yang sudah di rencanakan. Dengan begitu masyarakat akan mengetahui bagaimana kegiatan UP2K akan dilaksanakan selanjutnya. Dalam pemberian sosialisasi ini di berikan oleh OPD setempat kepada ibu-ibu yang akan mendapatkan kegiatan-kegiatan pelatihan UP2K. Sosialisasi akan diberikan oleh kelompok perempuan miskin yang akan mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan. Seperti halnya pula kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh DKP3 untuk ibu-kelompok perempuan miskin.

Setelah sosialisasi, langkah berikutnya adalah perumusan rencana aksi program. Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana. Pada tahapan ini, proposal atau pendanaan dilakukan oleh pihak desa. Anggaran sudah ditetapkan oleh dinas jauh sebelum kegiatan UP2K akan dilaksanakan, anggaran pasti akan dibuat terlebih dahulu. Untuk itu dalam tahapan ini program sudah dapat dilakukan dengan anggaran yang sudah dianggarkan oleh Dinas. Pada tahapan ini pula ibu-kelompok perempuan miskin sudah mulai mengikuti kegiatan sosialisasi akan adanya pelatihan-pelatihan yang akan diberikan. Melalui stake holder di masyarakat seperti RT, RW, Kader Posyandu mulai menggerakkan ibu-kelompok perempuan miskin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang diadakan program UP2K.

Kelompok sasaran, dalam hal ini kelompok perempuan miskin mulai dilibatkan secara langsung dalam tahapan ini dengan diadakannya pertemuan langsung antara dinas terkait yang memberikan pelatihan dengan ibu-kelompok perempuan miskin. Untuk itu berbagai peralatan yang mendukung kegiatan mulai disiapkan untuk menunjang jalannya kegiatan pelatihan. Sehingga pada tahapan ini perumusan rencana aksi telah dilakukan dengan sedemikian rupa untuk mendukung jalannya kegiatan pelatihan dengan baik. Waktu pelatihan mulai ditetapkan, pemberian pelatihan yang akan dilaksanakan berkisar 3-5 hari pelatihan mulai dari pagi hingga sore hari. Akan tetapi waktu tersebut dirasa kurang dalam mengaplikasikan pelatihan dengan maksimal. Sehingga pelatihan yang diberikan akan terkendalanya keterbatasan waktu yang kurang dalam pemberian keterampilan.

Setelah rencana tersusun, maka dilanjutkan dengan tahapan implementasi atau pelaksanaan program/kegiatan. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik. Perencanaan kegiatan yang sudah dibuat dapat terlaksana dengan baik. Pihak dinas terkait memberikan pelatihan kepada masing-masing kelompok perempuan miskin dengan sarana dan prasarana yang sudah disediakan. Dalam hal ini partisipasi ibu-kelompok perempuan miskin sangatlah baik dengan mengikuti kegiatan pelatihan sampai kegiatan ini selesai dengan waktu yang sudah ditentukan. Sehingga pada saat pelaksanaan sudah sesuai dengan kesepakatan jadwal yang dibuat saat rakor dengan DP2KBP3A dengan Bappeda, Dinas-dinas terkait lalu melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut bagi ibu-kelompok perempuan. Hal ini tentu saja juga tidak lepas dari pengawasan Dinas DP2KBP3A sebagai leading sektor dalam pelaksanaan UP2K.

Pembahasan

Selama beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pemberdayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif dan bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Pengakuan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pemberdayaan masyarakat memungkinkan mereka untuk melakukan kontrol atas keadaan mereka sendiri, sehingga menumbuhkan rasa keagenan dan ketahanan. Untuk mengatasi tantangan dinamis yang dihadapi masyarakat secara efektif, penting untuk menerapkan pendekatan inovatif yang dapat beradaptasi dan merespons dengan cepat. Salah satu pendekatan yang mendapatkan daya tarik adalah *Agile Governance*.

Agile Governance adalah metodologi yang meminjam prinsip-prinsip dari manajemen proyek tangkas dan menerapkannya pada proses tata kelola. Misalnya, mereka menerapkan pendekatan berulang terhadap pengembangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Metodologi ini menganjurkan pendekatan yang fleksibel dan mudah beradaptasi, dengan fokus pada kolaborasi dan pengambilan keputusan berulang, yang memberdayakan tim untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Misalnya, ketika suatu komunitas menghadapi

krisis yang tidak terduga, metodologi ini memungkinkan respons yang cepat dan efektif melalui pengambilan keputusan yang berulang-ulang. Pendekatan ini mengedepankan transparansi, inklusivitas, dan daya tanggap, sehingga ideal untuk memberdayakan masyarakat dan memaksimalkan potensi mereka.

Dasar pemikiran reformulasi kebijakan pemberdayaan masyarakat fokus pada peningkatan kolaborasi dan partisipasi dalam siklus kebijakan publik. Pendekatan tata kelola tradisional sering kali mengalami proses pengambilan keputusan yang bersifat *top-down*, sehingga membatasi keterlibatan masyarakat. Merumuskan kembali kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan metode tata kelola yang tangkas mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, sehingga memungkinkan mereka berkontribusi pada perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan pengambilan keputusan tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan pemberdayaan di antara anggota masyarakat. Lebih jauh, hal ini mendorong kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lapangan. Masyarakat menghadapi tantangan yang terus berkembang yang memerlukan solusi dinamis dan mudah beradaptasi. Tata kelola yang tangkas memungkinkan adanya umpan balik yang berkelanjutan, sehingga memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kebutuhan yang muncul dengan segera. Dengan merumuskan kembali kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan metode yang tangkas, para pengambil keputusan dapat secara proaktif merespons perubahan keadaan, memastikan bahwa intervensi tetap relevan dan efektif.

Persoalan lain yang juga krusial ada pada transparansi dan akuntabilitas. Tata kelola yang tangkas mendorong transparansi dan akuntabilitas dengan melibatkan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan merumuskan kembali kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan metode agile, pembuat kebijakan dapat menciptakan lingkungan yang menumbuhkan kepercayaan dan komunikasi terbuka. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan dibuat secara kolektif dan hasilnya selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Merumuskan kembali kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan metode tata kelola yang tangkas akan memfasilitasi alokasi sumber daya yang efisien. Sifat iteratif dari tata kelola yang tangkas (*agile governance*) memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi bidang-bidang perbaikan dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai. Pendekatan ini memastikan bahwa sumber daya diarahkan pada inisiatif yang mempunyai dampak terbesar, yang pada akhirnya mendorong pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat jangka panjang.

Reformulasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan metode agile governance, terutama dengan model dynamic governance, sangat penting untuk menjamin partisipasi aktif masyarakat dan pemberdayaan jangka panjang. Dengan mendorong kolaborasi, kemampuan beradaptasi, transparansi, dan alokasi sumber daya yang efisien, tata kelola yang tangkas memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengatasi tantangan dinamis yang dihadapi masyarakat secara efektif. Penerapan pendekatan inovatif ini akan membuka jalan bagi pembangunan masyarakat yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Neo dan Chen (2007:52) merumuskan dynamic governance sebagai bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan ketidakmenentuan dan perubahan lingkungan yang cepat sehingga kebijakan, institusi dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat. Dalam hal ini pelaksanaan UP2K untuk bidang ekonomi/daya beli memberikan pembekalan pelatihan-pelatihan ekonomi yang sudah direncanakan dalam rakor bersama BAPPEDA, DP2KBP3A dan Dinas-Dinas terkait pelaksana Program Terpadu UP2K. Jangkauan dari program ini adalah berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Akan tetapi

pembahasannya disini difokuskan pada kegiatan ekonomi/daya beli dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan bagi kelompok perempuan prasejahtera dalam kegiatan program Terpadu UP2K.

Pada penjelasan ketiga kelompok kegiatan tersebut, pemberian pelatihan dalam bidang ekonomi termasuk dalam ketiga rangkaian kelompok kegiatan tersebut sebagai satu kesatuan program. Pada tahapan kegiatan dasar mulai dibentuk nya kelompok pelatihan-pelatihan bagi kelompok perempuan miskin. Lalu pada kelompok kegiatan lanjutan dimulainya pembinaan pemberian pelatihan sebagai upaya peningkatan pendapatan. Dan terakhir pada kelompok kegiatan pendukung kegiatan pelatihan tersebut diharapkan agar dapat berjalan secara berkelanjutan setelah diberikannya pelatihan- pelatihan keterampilan tersebut. Sebagaimana yang sudah dilaksanakan, adanya kegiatan pelatihan-pelatihan yang diberikan berbeda setiap desa tergantung dengan kebutuhan dan peminatan ibu-kelompok perempuan miskin yang menjadi sasaran program UP2K. Pada pelaksanaannya ketika ibu-kelompok perempuan telah ikut terlibat aktif dalam program UP2K akan terlihatapa saja kebutuhan untuk menunjang pelatihan yang telah diberikan oleh UP2K. Tahap berikutnya akan dijelaskan bagaimana kebijakan dapat berubah ketika pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan melihat bagaimana kebutuhan kelompok perempuan miskin tersebut. Kebijakan yang dapat berubah mengikuti kebutuhan kelompok perempuan miskin dalam pelaksanaan UP2K, seperti pada kasus pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT). Pada kegiatan pelatihan KWT (Kelompok Wanita Tani) di Desa Watu Lanur yang diberi nama KWT Selendang Ratu sudah berjalan selama satu tahun. Pada pelaksanaan KWT ini memanfaatkan lahan sempit yang semakin minim untuk dijadikan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Untuk itu lahan sempit ini disulap menjadi wadah bagi kelompok perempuan miskin yang mengikuti kegiatan KWT menjadi kebun yang dapat menghasilkan hasil pertanian.

Pada pelaksanaan KWTdiberikan pelatihan tentang bercocok tanam mulai dari bagaimana menanam sayuran dengan media hidroponik sampai bagaimana menyemai benih untuk selanjutnya menjadi bibit tanaman. Serta diberikan nya pula sarana alat-alat pertanian untuk menunjang kegiatan tersebut. Tidak lupa pula pemberian bibit sebagai modal pertanian untuk selanjutnya kelompok perempuan miskin dapat mengembangkan hasil dari pertanian tersebut. Berjalan seiringnya waktu, kegiatan KWT ini mendapatkan banyak pelatihan-pelatihan, seperti halnya dari kementerian pertanian yang mendatangkan penyuluh pertanian dan membantu kelompok perempuan miskin dalam mengembangkan bercocoktanam. Serta adanya pula pelatihan olahan pangan dari hasil pertanian tersebut. Dengan begitu hasil pertanian yang didapatkan kelompok perempuan miskin dapat diolah dan dipasarkan. Dengan begitu kegiatan KWT tidak hanya diberikan pelatihan bertani dan menanam, akan tetapi juga adanya fasilitas dari pihak-pihak lain yang turut membantu dalam mengembangkan kegiatan pertanian KWT. Karena hasil pertanian yang melimpah, KWT mendapatkan pelatihan pengolahan hasil pertanian dari Penyuluh Kementerian Pertanian. Untuk itu dibutuhkan nya wadah bagi KWT untuk memasarkan hasil pertaniannya. Maka diberikannya wadah bagi KWT untuk memasarkan hasil pertanian tersebut salah satunya dengan mengikuti pasar tani.

Pada KWT Srikandi 10 masih awal permulaan dalam mengembangkan pertanian sehingga hanya baru menanam dan memanen saja. Untuk selanjutnya di KWT Srikandi 10, masih dipantau oleh penyuluh pertanian yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian. Agar selanjutnya KWT Srikandi 10 dapat mengembangkan hasil pertaniannya menjadi olahan hasil pertanian dan dapat dipasarkan secara luas sebagaimana yang sudah dilakukan oleh KWT di desa lainnya. Untuk itu dalam kebijakan pelaksanaan KWT ini dapat berubah dan menyesuaikan kebutuhan kelompok perempuan miskin. Contoh lainnya pada pelatihan menjahit. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh UP2K memberikan kelompok perempuan

miskin keterampilan untuk menjahit. Hal ini pula melihat adanya potensi yang dimiliki wilayah desa, dan untuk itu pada pelaksanaan UP2K difokuskan untuk diberikannya pelatihan menjahit. Pada saat pelaksanaan pelatihan kelompok perempuan miskin disediakan fasilitas peralatan menjahit. Kegiatan menjahit tersebut dilakukan di aula Desa Poco Ranaka. Akan tetapi melihat dari potensi kelompok perempuan miskin ini diberikan kursus menjahit membuat segaram anak sekolah.

Pada pelaksanaan UP2K kelompok perempuan miskin diberikan pelatihan-pelatihan sebagaimana yang sudah ditetapkan, akan tetapi kebijakan tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah dengan melihat kebutuhan dan potensi yang dimiliki kelompok perempuan miskin. Sehingga pada pelaksanaan selanjutnya akan mengikuti bagaimana kegiatan yang dibutuhkan bagi kelompok perempuan miskin dan dapat bersinergi dengan pihak-pihak lain yang dapat membantu mengembangkan keterampilan yang sudah mereka miliki. Agar untuk selanjutnya dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga kegiatan pelatihan keretampilan yang telah diberikan dapat menjadi salah satu kemampuan kelompok perempuan miskin dan dapat menjadi sumber penghasilan sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka. Sebelumnya, telah digambarkan oleh Neo dan Chen bahwa terdapat tiga elemen penting kapabilitas *dynamic governance*, yaitu berpikir masa depan (*thinking ahead*), berpikir kembali (*thinking again*), dan berpikir melintas (*thinking across*). *Thinking ahead* berkaitan dengan berpikir ke masa depan. *Thinking again*, berkenaan dengan kemampuan dan kemauan untuk memikirkan kembali dan membuat kembali kebijakan. *Thinking across*, berhubungan dengan berpikir melintas, yaitu kemampuan dan keterbukaan untuk menyebrang batas-batas untuk belajar dari pengalaman orang lain, sehingga ide-ide dan konsep baru dapat diperkenalkan ke suatu instansi. Dalam pelaksanaan UP2K yang sudah dilakukan dapat kita analisis dengan tiga element penting kapabilitas *dynamic governance*.

Dengan berpikir masa depan (*think ahead*), para pemangku kebijakan sudah melihat bagaimana konsep pemberdayaan dan bagaimana pemberdayaan tersebut dilaksanakan. Seperti halnya dalam program UP2K disini kebijakan program pemberdayaan sudah dibuat sedemikian rupa khususnya untuk kelompok perempuan miskin. Pada proses nya, sebelum melaksanakan program diadakannya pengkajian terlebih dahulu untuk menentukan daerah dan sasaran yang akan menjadi lokasi pelaksanaan program UP2K. Tentu saja dalam penentuan tersebut semua organisasi perangkat daerah dilibatkan untuk penentuan lokasi dan sasaran yang akan menjadi penerima program UP2K. Tidak hanya penentuan lokasi tetapi juga penentuan anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan program UP2K. Terlebih dahulu OPD atau dinas-dinas setempat melaksanakan rapat koordinasi tingkat Kabupaten Manggarai Timur bersama BAPPEDA. Hal ini dilakukan untuk melihat dan mengkaji bagaimana IPM pembangunan Kecamatan Poco Ranaka yang tergolong rendah lalu melihat data BDT (Basis Data Terpadu) untuk mengetahui berapa banyak warga miskin yang berada di Kecamatan Poco Ranaka, khususnya Desa Ratu Jaya dan Poco Ranaka. Dengan pertimbangan tersebut maka selanjutnya akan dilakukan perencanaan mengenai penetapan program UP2K yang akan dilaksanakan. Setelahnya OPD terkait menyusun tim untuk pelaksanaan Program UP2K di Kecamatan Poco Ranaka.

Setelah mengkaji lokasi maka dilakukannya asesmen untuk mengetahui permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh daerah sasaran tersebut, khususnya di Desa Watu Lanur dan Desa Poco Ranaka, Kecamatan Poco Ranaka. Dengan demikian dilakukannya koordinasi dengan pihak-pihak stake holder untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan dan untuk mengembangkan potensi yang ada. Dalam proses ini dinas-dinas terkait melakukan survei terlebih dahulu. Melalui OPD di tingkat desa, dinas melakukan kordinasi untuk penetapan akan dilaksanakannya program UP2K. Untuk selanjutnya, dari desa akan turun kebawah melalui RT

dan RW untuk selanjutnya mengkaji dan melihat potensi SDM yang ada di masing-masing desa. Pihak desa akan membuat list kegiatan yang akan dilaksanakan untuk selanjutnya akan di komukasikan kepada kelompok perempuan miskin sebagai sasaran dalam pelaksanaan program UP2K. Pihak desa juga membuat pertemuan dengan kelompok perempuan miskin untuk mendiskusikan kegiatan yang diajukan pihak desa apakah sesuai dengan peminatan kelompok perempuan miskin. Selanjutnya ibu-ibu merespon kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Pada pertemuan ini menjadi awal penentuan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di masing-masing desa. Setiap desa memiliki kegiatan yang berbeda- beda sesuai peminatan kelompok perempuan miskin.

Di Desa Watu Lanur, kelompok perempuan miskin mengikuti kegiatan KWT (Kelompok Wanita Tani), menjahit serta menyulam. Sedangkan di desa Poco Ranaka, diadakan kegiatan KWT, memasak/olahan panganan, dan menjahit. Dengan demikian pada elemen *thinking ahead*, telah dilakukannya perencanaan kebijakan sedemikian rupa dengan mengajak instansi dinas-dinas terkait, OPD dan kelompok perempuan miskin untuk berfikir secara kedepan. Kegiatan UP2K sebagai salah satu program yang dapat memberikan dampak untuk peningkatan ekonomi mereka dengan dilaksanakannya pelatihan-pelatihan yang sudah di buat sesuai peminatan tersebut. Berfikir kembali (*thinking again*), merupakan kemampuan meninjau kembali berbagai kebijakan, strategi, dan program yang sedang berjalan. Pada pelaksanaan program UP2K, ibu-kelompok perempuan miskin sudah mulai mengikuti kegiatan sosialisai akan adanya pelatihan-pelatihan yang akan diberikan. Melalui stake holder di masyarakat seperti RT, RW, kader posyandu mulai mengegrakan ibu-kelompok perempuan miskin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang diadakan program UP2K. Perencanaan kegiatan yang sudah dibuat dapat terlaksana dengan baik. Pihak dinas terkait memberikan pelatihan kepada masing-masing kelompok perempuan miskin dengan sarana dan prasarana yang sudah disediakan. Dalam hal ini parisipasi ibu-kelompok perempuan miskin sangatlah baik dengan mengikuti kegiatan pelatihan sampai kegiatan ini selesai dengan waktu yang sudah ditentukan. Hal tersebut seperti yang dituturkan oleh kelompok perempuan miskin bahwa dengan mengikuti kegiatan pelatihan merasa mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan dapat menambah kemampuan mereka karena sesuai dengan peminatan masing-masing.

Dengan demikian hal ini pula tidak terlepas dari hambatan yang di hadapi oleh ibu-kelompok perempuan miskin. Dalam pelaksanaan seperti pelatihan memasak dan membuat kue, alat-alat telah di sediakan oleh pihak dinas sehingga dengan mudah di praktekkan. Akan tetapi setelah selesainya pelaksanaan keterampilan yang diberikan, ibu-kelompok perempuan miskin tidak memiliki alat-alat yang disediakan dinas, sehingga mereka tidak dapat mempraktekkannya dengan mudah. Untuk hasil dari menyulam, ibu rumah miskin kesulitan dalam memasarkan produk jika mereka sudah memproduksinya. Berbeda dengan pelatihan-pelatihan seperti menjahit yang dapat dengan mudah dilakukan setelah kegiatan keterampilan diberikan. Untuk KWT ibu-ibu juga sudah dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan dinas seperti alat-alat pertanian dan bibit tanaman. Dalam memahami bagaimana program pemberdayaan melalui model agile governance, terutama pendekatan dynamicgovernance, perlu dipahami tiga hal: *thinking again*, *thinking across*, dan *thingking ahead*. Proses peninjauan ulang (*thinking again*) disini perlu dilakukan untuk menilai apakah kegiatan pelatihan ini dapat berdampak untuk jangka panjang. Dapat dikatakan bahwa pelatihan yang diberikan tentunya akan memberikan tambahan ilmu dan keterampilan bagi kelompok perempuan miskin. Pada pelaksanaan program UP2K sudah dapat terlihat ketika program pelatihan telah berjalan aspek apa saja yang kurang dan dapat diperbaiki. Dengan begitu evaluasi juga dilakukan saat sedang berjalannya program UP2K. Hal ini tentu untuk meminjau kembali kebijakan, strategi, dan

program untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menonjol yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan.

Pada berpikir melintas (*thinking across*), merupakan kemampuan untuk mengadopsi pikiran, pendapat dan ide-ide lain diluar kerangka berpikir yang secara tradisional telah melekat dan menjadi dasar melakukan sesuatu. Untuk itu dalam pelaksanaan UP2K, thinking accros dapat dilihat melalui evaluasi yang telah dilakukan setelah program berjalan. Evaluasi dapat dilakukan saat program sedang berjalan dan setelah berjalannya program. Untuk itu selalu dilakukannya evaluasi kegiatan-kegiatan pelatihan yang telah diberikan. Evaluasi juga dapat dilakukan dengan adanya monitoring yang di laksanakan melalui grup *whatsapp* dengan ibu-ibu. Setelah pelaksanaan program kelompok perempuan miskin diminta untuk menulis kesan dan pesan setelah kegiatan pelatihan berjalan. Setelah dilaksanakan kegiatan program terpadu UP2K, beberapa program dinilai masih berjalan dengan baik. Seperti program KWT masih terus berjalan walaupun kegiatan sudah berjalan satu tahun berlalu. Untuk di wilayah Kecamatan, program UP2K masih terus diberikan dan monitoring masih terus dilakukan. Monitoring dilakukan melalui grup-grup *whatsapp* yang telah dibuat sehingga memudahkan untuk berbagi informasi secara langsung. Setelah pelaksanaan program dapat pula di sinergikan dengan program lainnya seperti yang sudah dijelaskan dalam konsep *dynamic governance* sebelumnya, bahwa kebijakan itu bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti kebutuhan masyarakat tersebut.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pemberdayaan ibu rumah tangga miskin melalui program UP2K maka disimpulkan bahwa model pemberdayaan yang dilakukan bagi ibu rumah tangga miskin melalui program UP2K telah dilakukan sesuai dengan tahapan pemberdayaan. Dalam kaitannya dengan *Dynamic Governance*, pelaksanaan kegiatan pelatihan yang diberikan oleh UP2K kelompok perempuan miskin diberikan pelatihan-pelatihan sebagaimana yang sudah ditetapkan, akan tetapi kebijakan tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah dengan melihat kebutuhan dan potensi yang dimiliki kelompok perempuan miskin. Sehingga pada pelaksanaan selanjutnya akan mengikuti bagaimana kegiatan yang dibutuhkan bagi kelompok perempuan miskin dan dapat bersinergi dengan pihak-pihak lain yang dapat membantu mengembangkan keterampilan yang sudah mereka miliki. Pada prakteknya program UP2K ini dapat menjadi salah satu alternatif program dalam memberikan pelatihan bagi kelompok perempuan miskin untuk menambah kemampuan dan keterampilan sehingga kelompok perempuan miskin dapat berusaha secara mandiri untuk meningkatkan prekonomiannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini adalah bagian dari penelitian yang bertajuk *Agile Governance Model dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Kelompok Perempuan Prasejahtera di Wilayah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)*, melalui Skema Hibah Penelitian Fundamental, berdasarkan Keputusan Nomor 0536/E5/PG.02.00/2023 dan Perjanjian/Kontrak 179/E5/PG.02.00/PL/2023 antara Dirjen Diktiristek dengan LLDIKTI 3 tanggal 19 Juni 2023; Kontrak Nomor 1421/LL3/AL.04/2023 antara LLDIKTI 3 dengan UMJ tanggal 26 Juni 2023; dan Kontrak Nomor 428/R-UMJ/VI/2023 antara Rektor UMJ dengan peneliti tanggal 27 Juni 2023. Tim mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Diktiristek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, LLDIKTI Wilayah 3, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta atas bantuan dan fasilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M. (2012). Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Melalui Pendekatan Sosial Entrepreneurship (Studi Kasus di Daerah Tertinggal, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat). *Jurnal Sosiokonsepsia*, 17(03), 241–251.
- BPP Manggarai Timur. (2019). *RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024*.
- Handayani, S., Bismala, L., & Arda, M. (2019). Program Kemitraan Masyarakat Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli. *Prosiding Seminar Nasional ...*, 1(1), 52–57. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/3579>
- Hardiyanti, I., Stiawati, T., & Indriyany, I. A. (2020). Evaluasi Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Serang Tahun 2017. *Ijd-Demos*, 1(1), 54–77. <https://doi.org/10.31506/ijd.v1i1.6>
- Lestari, A. Y., Humaedi, S., & Rusyidi, B. (2019). Partisipasi Perempuan Dalam Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2Wkss) Di Rw 12 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. *Share : Social Work Journal*, 9(1), 49. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.20689>
- Noer, K. U. (2021). Pemberdayaan perempuan kepala keluarga miskin melalui program P2WKSS di Kota Bekasi. *Community Empowerment*, 6(5), 864–876.
- Noer, K. U., & Madewanti, N. L. G. (2020). Too many Stages , Too Little Time : Bureaucratization and Impasse in the Social Safety Net Program in Indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(3), 370–400.
- Noer, K. U., Putra, S., & Madewanti, N. L. G. (2021). *Evaluation of empowerment programs for women's groups and marginalized groups in East Nusa Tenggara: an urgency for change*.
- Nurfadillah, S. U. (2019). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Up2K-Pkk Di Desa Kayuambon Lembang. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(1), 90. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v2i1.2430>
- Prasetyawan, A. A. (2020). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendirian Kelompok Usaha Serai Pitay Berbasis Socialpreneur Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kupang NTT. *Transformatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 101–118.
- Purnama, D., & Suhendar, D. (2022). Pelatihan Perencanaan Keuangan dan Pengelolaan Risiko Usaha Pada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Desa Karangtawang, Kuningan. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(02), 173–178. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v5i02.5116>
- Putri, F. D., & Noer, K. U. (2019). Accessibility of national health guarantee-health indonesia cards (jkn-kis) for family scenarios in headquarters in tpa cipayung - depok. *ICSS Proceedings*, 101, 5–6.